

Jakarta, 4 September 2024

Kepada:

PT Mitra Media Nusantara (infosawit.com) Jl. Raya Leuwinanggung No.55, Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16456

UP : Pemimpin Redaksi

Merujuk pada pemberitaan yang dirilis oleh media online **infosawit.com** pada tanggal 2 September 2024 dengan headline "Langgar Kode Etik, RSPO Hentikan Keanggotaan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk" (tautan https://www.infosawit.com/2024/09/02/langgar-kode-etik-rspo-hentikan-keanggotaan-pt-bakrie-sumatera-plantations-tbk/), dengan ini kami PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("BSP") **mengajukan protes keras** dan **menggunakan hak jawab** kami agar media online **infosawit.com** mencabut berita dan/atau merehabilitasi nama baik BSP dengan mengeluarkan berita yang berimbang.

Adapun alasan dan pertimbangan yang dilakukan BSP adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa BSP yang secara sukarela terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil ("RSPO") melalui surat pengunduran diri tertanggal 5 Agustus 2024. Sedangkan surat panel RSPO dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024, yang terjadi setelah pengunduran diri BSP dimaksud.
- 2. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi pada anak usaha BSP yaitu PT Grahadura Leidongprima ("GLP") terkait tuntutan kelompok masyarakat tertentu mengenai kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat, menurut kami pada saat ini belum merupakan kewajiban GLP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dikarenakan ketika GLP memperoleh Izin Usaha Perkebunan pada tanggal 8 Desember 2004, kewajiban tersebut belum ada melainkan baru mulai diberlakukan sejak tanggal 28 Februari 2007 dan tidak berlaku surut. Meskipun demikian, sejak tahun 2022 GLP telah melakukan kemitraan produktif dengan masyarakat melalui koperasi atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam mendukung program peremajaan sawit rakyat (PSR).
- 3. Terkait penanganan keluhan oleh RSPO atas laporan pengaduan dari kelompok Masyarakat kepada GLP selaku anak usaha dari BSP, secara objektif kami sangat menyayangkan pendirian dan sikap RSPO dalam prosedur menangani adanya suatu keluhan atau pengaduan yang tidak dilakukan secara proper dalam proses identifikasi, validasi dan verifikasi terhadap subyek hukum pengadu dan substansi permasalahan yang diadukan. Dalam proses pembahasan penanganan keluhan antara GLP dengan RSPO, telah kami sampaikan secara tegas beberapa kali perihal kejelasan subjek hukum pengadu sebagai bentuk kepastian hukum yang mendasari proses penanganan keluhan oleh RSPO ini.

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Kompleks Rasuna Epicentrum, Bakrie Tower Lantai 19 Jl.HR. Rasuna Said Jakarta 12960 - Indonesia Telephone: +62-21 29941286-87 Facsimile: +62-21 29941752

Plantation Office: Jl.Ir. H. Juanda

Kab Asahan, Kisaran 21202 Sumatera Utara - Indonesia Telephone : +62-623 414 34 Facsimile : +62-623 410 66 Namun pihak RSPO tidak merespon dengan baik dan tetap melanjutkan proses penanganan keluhannya sehingga terkesan tidak melindungi kepentingan anggotanya sendiri.

- 4. BSP telah mengajukan surat klarifikasi kepada RSPO atas terbitnya Surat Keputusan Panel Pengaduan RSPO tentang Pengaduan terhadap GLP, anak perusahaan BSP tertanggal 26 Agustus 2024 (terlampir) dan meminta agar RSPO segera merevisi Surat Keputusannya dan mempublikasikan revisi Surat Keputusan tersebut di dalam website RSPO.
- 5. BSP berhak mengajukan pengunduran diri dalam keanggotaan RSPO semata-mata BSP memandang tidak ada kemanfaatan dan memberikan keuntungan bagi BSP pada saat ini.

Bahwa BSP sangat menyayangkan pemberitaan oleh media online **infosawit.com** tersebut dirilis tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada BSP. Berita online **infosawit.com** tersebut telah menggiring opini publik yang negatif sehingga BSP merasa sangat dirugikan, seolah-olah BSP keluar dari keanggotaan RSPO karena melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Semestinya peranan pers adalah menjunjung keadilan dan kebenaran, bukan malah sebaliknya. Oleh sebab itu, kami mencadangkan hak kami untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna memulihkan nama baik BSP, termasuk mengajukan hak jawab maupun menggunakan jalur hukum.

BSP dan anak usaha akan senantiasa selalu mematuhi ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, berupaya menerapkan best practices dalam bidang usaha Perkebunan baik aspek lingkungan dan sosial, serta menjunjung prinsip Tata Kelola Perusahaan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas serta mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan (sustainability values).

Hormat Kami,

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Direktur Otama

Tembusan. Dewan Pers



Jakarta, 4 September 2024

Kepada:

PT Media Bisnis Komunikasi (emitennews.com) Gedung Karindra,I, Jl. Palmerah Sel. No.30A, Kecamatan Tanah Abang, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

UP : Pemimpin Redaksi

Merujuk pada pemberitaan yang dirilis oleh media online **emitennews.com** pada tanggal 2 September 2024 dengan headline "RSPO Hentikan Keanggotaan Bakrie Sumatera (UNSP), Ini Alasannya" (tautan https://emitennews.com/news/rspo-hentikan-keanggotaan-bakrie-sumatera-unsp-ini-alasannya), dengan ini kami PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("BSP") **mengajukan protes keras** dan **menggunakan hak jawab** kami agar media online **emitennews.com** mencabut berita dan/atau merehabilitasi nama baik BSP dengan mengeluarkan berita yang imbang.

Adapun alasan dan pertimbangan yang dilakukan BSP adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa BSP yang secara sukarela terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil ("RSPO") melalui surat pengunduran diri tertanggal 5 Agustus 2024. Sedangkan surat panel RSPO dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024, yang terjadi setelah pengunduran diri BSP dimaksud.
- 2. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi pada anak usaha BSP yaitu PT Grahadura Leidongprima ("GLP") terkait tuntutan kelompok masyarakat tertentu mengenai kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat, menurut kami pada saat ini belum merupakan kewajiban GLP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dikarenakan ketika GLP memperoleh Izin Usaha Perkebunan pada tanggal 8 Desember 2004, kewajiban tersebut belum ada melainkan baru mulai diberlakukan sejak tanggal 28 Februari 2007 dan tidak berlaku surut. Meskipun demikian, sejak tahun 2022 GLP telah melakukan kemitraan produktif dengan masyarakat melalui koperasi atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam mendukung program peremajaan sawit rakyat (PSR).
- 3. Terkait penanganan keluhan oleh RSPO atas laporan pengaduan dari kelompok Masyarakat kepada GLP selaku anak usaha dari BSP, secara objektif kami sangat menyayangkan pendirian dan sikap RSPO dalam prosedur menangani adanya suatu keluhan atau pengaduan yang tidak dilakukan secara proper dalam proses identifikasi, validasi dan verifikasi terhadap subyek hukum pengadu dan substansi permasalahan yang diadukan. Dalam proses pembahasan penanganan keluhan antara GLP dengan RSPO, telah kami sampaikan secara tegas beberapa kali perihal kejelasan subjek hukum pengadu sebagai bentuk kepastian hukum yang mendasari proses penanganan keluhan oleh RSPO ini.

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Kompleks Rasuna Epicentrum, Bakrie Tower Lantai 19 Jl.HR. Rasuna Said Jakarta 12960 - Indonesia Telephone: +62-21 29941286-87 Facsimile: +62-21 29941752

Plantation Office : Jl.Ir. H. Juanda

Kab Asahan, Kisaran 21202 Sumatera Utara - Indonesia Telephone : +62-623 414 34 Facsimile : +62-623 410 66 Namun pihak RSPO tidak merespon dengan baik dan tetap melanjutkan proses penanganan keluhannya sehingga terkesan tidak melindungi kepentingan anggotanya sendiri.

- 4. BSP telah mengajukan surat klarifikasi kepada RSPO atas terbitnya Surat Keputusan Panel Pengaduan RSPO tentang Pengaduan terhadap GLP, anak perusahaan BSP tertanggal 26 Agustus 2024 (terlampir) dan meminta agar RSPO segera merevisi Surat Keputusannya dan mempublikasikan revisi Surat Keputusan tersebut di dalam website RSPO.
- 5. BSP berhak mengajukan pengunduran diri dalam keanggotaan RSPO semata-mata BSP memandang tidak ada kemanfaatan dan memberikan keuntungan bagi BSP pada saat ini.

Bahwa BSP sangat menyayangkan pemberitaan oleh media online emitennews.com tersebut dirilis tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada BSP. Berita online emitennews.com tersebut telah menggiring opini publik yang negatif sehingga BSP merasa sangat dirugikan, seolah-olah BSP keluar dari keanggotaan RSPO karena melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Semestinya peranan pers adalah menjunjung keadilan dan kebenaran, bukan malah sebaliknya. Oleh sebab itu, kami mencadangkan hak kami untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna memulihkan nama baik BSP, termasuk mengajukan hak jawab maupun menggunakan jalur hukum.

BSP dan anak usaha akan senantiasa selalu mematuhi ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, berupaya menerapkan best practices dalam bidang usaha Perkebunan baik aspek lingkungan dan sosial, serta menjunjung prinsip Tata Kelola Perusahaan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas serta mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan (sustainability values).

Hormat Kami, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Tembusan. Dewan Pers

Bayu Irianto Direktur Utama



Jakarta, 4 September 2024

Kepada:

PT Obor Sarana Utama (wartaekonomi.co.id) Jl. Tebet Raya Nomor 85A, Tebet Tim., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820

UP : Pemimpin Redaksi

Merujuk pada pemberitaan yang dirilis oleh media online wartaekonomi.co.id pada tanggal 3 September 2024 dengan headline "Gagal Penuhi Faktor Ini, Keanggotaan Bakrie Sumatera Dicopot RSPO" (tautan https://wartaekonomi.co.id/read543610/gagal-penuhi-faktor-ini-keanggotaan-bakrie-sumatera-dicopot-rspo), dengan ini kami PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk ("BSP") mengajukan protes keras dan menggunakan hak jawab kami agar media online wartaekonomi.co.id mencabut berita dan/atau merehabilitasi nama baik BSP dengan mengeluarkan berita yang imbang.

Adapun alasan dan pertimbangan yang dilakukan BSP adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa BSP yang secara sukarela terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil ("RSPO") melalui surat pengunduran diri tertanggal 5 Agustus 2024. Sedangkan surat panel RSPO dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024, yang terjadi setelah pengunduran diri BSP dimaksud.
- 2. Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi pada anak usaha BSP yaitu PT Grahadura Leidongprima ("GLP") terkait tuntutan kelompok masyarakat tertentu mengenai kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat, menurut kami pada saat ini belum merupakan kewajiban GLP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dikarenakan ketika GLP memperoleh Izin Usaha Perkebunan pada tanggal 8 Desember 2004, kewajiban tersebut belum ada melainkan baru mulai diberlakukan sejak tanggal 28 Februari 2007 dan tidak berlaku surut. Meskipun demikian, sejak tahun 2022 GLP telah melakukan kemitraan produktif dengan masyarakat melalui koperasi atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam mendukung program peremajaan sawit rakyat (PSR).
- 3. Terkait penanganan keluhan oleh RSPO atas laporan pengaduan dari kelompok Masyarakat kepada GLP selaku anak usaha dari BSP, secara objektif kami sangat menyayangkan pendirian dan sikap RSPO dalam prosedur menangani adanya suatu keluhan atau pengaduan yang tidak dilakukan secara proper dalam proses identifikasi, validasi dan verifikasi terhadap subyek hukum pengadu dan substansi permasalahan yang diadukan. Dalam proses pembahasan penanganan keluhan antara GLP dengan RSPO, telah kami sampaikan secara tegas beberapa kali perihal kejelasan subjek hukum pengadu sebagai bentuk kepastian hukum yang mendasari proses penanganan keluhan oleh RSPO ini.

PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Kompleks Rasuna Epicentrum, Bakrie Tower Lantai 19 JI.HR. Rasuna Said Jakarta 12960 - Indonesia Telephone: +62-21 29941286-87

Facsimile: +62-21 29941752 Plantation Office:

Jl.Ir. H. Juanda Kab Asahan, Kisaran 21202 Sumatera Utara - Indonesia Telephone: +62-623 414 34 Facsimile: +62-623 410 66 Namun pihak RSPO tidak merespon dengan baik dan tetap melanjutkan proses penanganan keluhannya sehingga terkesan tidak melindungi kepentingan anggotanya sendiri.

- 4. BSP telah mengajukan surat klarifikasi kepada RSPO atas terbitnya Surat Keputusan Panel Pengaduan RSPO tentang Pengaduan terhadap GLP, anak perusahaan BSP tertanggal 26 Agustus 2024 (terlampir) dan meminta agar RSPO segera merevisi Surat Keputusannya dan mempublikasikan revisi Surat Keputusan tersebut di dalam website RSPO.
- 5. BSP berhak mengajukan pengunduran diri dalam keanggotaan RSPO semata-mata BSP memandang tidak ada kemanfaatan dan memberikan keuntungan bagi BSP pada saat ini.

Bahwa BSP sangat menyayangkan pemberitaan oleh media online wartaekonomi.co.id tersebut dirilis tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada BSP. Berita online media online wartaekonomi.co.id tersebut telah menggiring opini publik yang negatif sehingga BSP merasa sangat dirugikan, seolah-olah BSP keluar dari keanggotaan RSPO karena melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Semestinya peranan pers adalah menjunjung keadilan dan kebenaran, bukan malah sebaliknya. Oleh sebab itu, kami mencadangkan hak kami untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna memulihkan nama baik BSP, termasuk mengajukan hak jawab maupun menggunakan jalur hukum.

BSP dan anak usaha akan senantiasa selalu mematuhi ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, berupaya menerapkan best practices dalam bidang usaha Perkebunan baik aspek lingkungan dan sosial, serta menjunjung prinsip Tata Kelola Perusahaan yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas serta mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan (sustainability values).

Hormat Kami, PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Tembusan. Dewan Pers